

Revitalisasi Peran Filsafat sebagai Proses Transformasi Masyarakat Multikultural

Revitalizing the Role of Philosophy as a Process of Transformation in Multicultural Society

Juwaini

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*Email: juwaini@ar-raniry.ac.id

Abstract

Philosophical thought has implications for the process of societal transformation, encompassing both the development of science and technology and the development of multicultural societies themselves. This study aims to examine how philosophy plays a role in the transformation of multicultural societies and the position of philosophy within the social framework of a multicultural society. A qualitative approach with a literature review model is employed in this study. The findings of this study demonstrate that multicultural societies in Indonesia have undergone transformation parallel to global advancements in science, technology, and societal progress. Consequently, the study of philosophy needs to be revitalized both academically and sociologically. There are three crucial points that require revitalization, namely through the three pillars of *El*: social philosophy's eligibility, the elimination of perennialistic thinking, and the elaboration of progressive multicultural philosophy.

Keywords: *Philosophy, Multicultural Societies, Revitalization*

Abstrak

Pemikiran filsafat memiliki implikasi terhadap proses transformasi masyarakat, baik itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perkembangan masyarakat multikultural itu sendiri. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana filsafat berperan dalam transformasi masyarakat multikultural dan bagaimana kedudukan filsafat dan tatanan sosial masyarakat yang multikulturalistik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kepustakaan. Kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat multikultural di Indonesia telah bertransformasi seiring dengan perkembangan dunia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, studi filsafat perlu direvitalisasi, baik secara akademis ataupun sosiologis. Ada tiga poin penting yang perlu direvitalisasi, yaitu melalui tiga pilar *El*; eligibilitas filsafat sosial, eliminasi berpikir perenialistik, dan elaborasi filsafat multikulturalisme progresif.

Kata Kunci: *Filsafat, Masyarakat Multikultural, Revitalisasi*

A. Pendahuluan

Falsafah tentang kehidupan manusia dalam suatu entitas kemasyarakatan mengimplikasikan adanya suatu sistem berpikir teoritis dan praktis. Landasan berpikir yang selanjutnya melandasi suatu cara berpikir filsafat yang bersesuaian dengan kehidupan bermasyarakat, sebenarnya bukan kontrol mindset sosial melainkan muncul dari setiap individu dalam suatu sistem sosial. Permasalahan utama sering terjadi ketika menggali peran filsafat dalam sistem sosial kemasyarakatan adalah tidak adanya kepedulian masyarakat akan kehadiran filsafat itu sendiri. Umumnya masyarakat beranggapan bahwa filsafat hanya acuan kajian yang sifatnya teoritis di dunia akademik, namun tidak menyentuh kehidupan masyarakat.

Anggapan filsafat sebagai subjek ilmu yang hanya dipelajari secara akademis, sebenarnya tidak tepat sasaran. Pun demikian, garis-garis batas peran filsafat dalam linieritas sosial sebenarnya juga masih dipertanyakan. Selain itu masyarakat juga berpikir bahwasanya tidak ada gunanya berfilsafat dalam kehidupan, karena filsafat berisi teori-teori yang melangit tanpa menyentuh bumi. Dilema ini begitu kentara dirasakan dalam dunia akademik. Karenanya sering ditemukan mahasiswa kesulitan mempelajari filsafat itu sendiri. Ragam ilmu filsafat tidak menyentuh sisi-sisi kehidupan mereka apalagi merasakan manfaatnya secara langsung.

Pernyataan di atas memunculkan tanda tanya besar para ilmuwan. Meskipun peran filsafat dalam transformasi kontekstual masyarakat kurang ditanggapi, atau suatu hal yang tabu, John Dewey (1948) pernah mengatakan bahwasanya tugas seorang filsuf tidak hanya mentransfer pemikiran-pemikiran atau ide-ide, melainkan juga menggali inspirasi dari ide-ide para filsuf masa lalu untuk menyelesaikan persoalan saat ini. Dewey, sebagaimana ditegaskan oleh Morris, memaknai filsafat harus dinamis sebagai upaya mencintai kebijaksanaan. Mencintai kebijaksanaan memuat keyakinan tentang nilai-nilai moral yang membimbing perilaku baik dalam hidup bermasyarakat (Morris and Shapiro 1993:39). Karena itu filsafat berkaitan erat dengan sistem moral suatu masyarakat, yang berimplikasi mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Artinya suatu keadaan masyarakat diadaptasi dari falsafah hidup, dan falsafah hidup berkaitan dengan cara berpikir individu dan masyarakatnya.

Mencermati gagasan Dewey tentang keterkaitan filsafat dengan kesadaran moral individu dan akan tanggung jawab sosialnya, karakter filsafat dalam sosial juga berupaya membangun kehidupan masyarakat lebih berkualitas (M Yunus 2010; Prasetyo, Yohanes Wahyu 2020; Rahman 2018; Webster 2017:62). Dengan demikian, proses berfilsafat mengindikasikan pendekatan rasional ilmiah dan metode berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan teoritis dan intelektual individu belaka (Morris and Shapiro 1993:40). Salah satu realitas kehidupan yang menghendaki peran filsafat di dalamnya yaitu keragaman masyarakat itu sendiri. Saat ini, masyarakat sebagai entitas aktif yang menghuni sebuah tempat, baik di desa ataupun di kota sudah banyak yang heterogen. Ada berbagai macam perbedaan seperti tingkat pendidikan, kekayaan dan kedudukan sosial atau yang lazim disebut sebagai stratifikasi sosial atau kemajemukan vertikal. Selain itu masyarakat Indonesia saat ini juga memiliki ragam suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, atau dikenal sebagai perbedaan horizontal. Perbedaan cara pandang, prinsip dan nilai-nilai primordial, jika tidak dimaknai dengan benar, cenderung memicu api konflik, dan tidak tertutup kemungkinan konflik fisik bahkan perang terjadi karena perbedaan ini. Maka tidak heran ada yang menyatakan bahwa karena ;perbedaan inilah yang sering menyebabkan konflik-konflik dalam suatu masyarakat, karena tidak adanya pemahaman tentang makna hidup dalam masyarakat yang multikultural (Bahri 2018)

Sebagai contoh, ketika Hitler melakukan “genosida” terhadap golongan Yahudi, pikiran yang dibangun saat itu bahwasanya ras dirinya lebih mulia dari orang lain. Ras arya dibangga-banggakan, dan menjadi simbol ataupun seragam ideologi untuk memerangi orang-orang yang berbeda dengannya. Jika saja Hitler memikirkan secara sederhana bahwa suatu ras tidak mungkin eksis di dunia ini, maka serangan kepada ras atau etnis, agama, yang berbeda tidak akan terjadi. Jika saja manusia berpikir bahwa suatu individu adalah hakikat adanya

suatu masyarakat, maka seseorang akan menghargai perbedaan yang ada pada orang lain. Cara berpikir seperti ini menyiratkan adanya pemaknaan hidup yang sebenarnya dalam suatu kebijaksanaan dan moralitas manusia.

Melalui filsafat, manusia merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup, kebenaran dan makna hidup itu sendiri. Filsafat membantu manusia dalam mencari arti dan pemahaman mendalam tentang hidup dan eksistensi individu itu sendiri. Dalam berfilsafat, melibatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, sehingga mendorong individu mempertanyakan keyakinan, nilai-nilai, dan prinsip hidup bersama (togetherness) (Atabik 2014; Pradana 2020; Wattimena 2020). Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana filsafat berperan dalam transformasi masyarakat multikultural dan bagaimana kedudukan filsafat dan tatanan sosial masyarakat yang multikulturalistik.

B. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dengan model studi kepustakaan. Penulis menghimpun data dan informasi melalui teks bacaan (buku dan jurnal) yang relevan dengan tujuan kajian. Setelah data kepustakaan dikumpulkan penulis kemudian melakukan analisis dengan cara memperbandingkan, menginterpretasi, dan menyimpulkan data-data yang ditemukan secara konseptual sesuai dengan fokus kajian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Transformasi masyarakat Indonesia telah berubah secara periodik dan bertahap, hingga ke arah masyarakat yang multikulturalistik saat ini. Filsafat berperan sentral dalam transformasi masyarakat, namun demikian filsafat yang berperan tidak identik dengan filsafat klasik melainkan filsafat kontemporer yang berbasiskan sistem sosial masyarakat suatu bangsa. Secara umum, kajian ini menemukan upaya revitalisasi peran filsafat dalam perubahan sosial masyarakat yang multikultural berbasiskan tiga pilar *EL*. Ketiga pilar tersebut adalah sebagai berikut:

Eligibilitas Filsafat Sosial

Masyarakat multikultural memiliki beberapa ciri khas yang menggambarkan keadaannya. Pertama, keberagaman budaya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat tersebut. Setiap kelompok etnis dan budaya memiliki tradisi, kepercayaan, dan praktik yang unik, yang berkontribusi pada kekayaan budaya masyarakat multikultural. Kedua, masyarakat ini ditandai oleh adanya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Anggota masyarakat multikultural belajar untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai keberagaman mereka. Keadaan ini memiliki implikasi praktis, bahwasanya filsafat tidak meminjam keadaan sosial sebagai kajiannya melainkan keadaan sosial menjadi filsafat itu sendiri. Karena itu memetakan transformasi masyarakat sosial adalah kajian filsafat sosial berbasis multikultural yang harus dilakukan secara tegas dan praktis. Misalnya, penyebutan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbudaya dan religius, santun, dan toleransi, bisa diganti dengan sebutan masyarakat yang Pancasila. Selain berkonotasi pragmatik, sebutan seperti ini menegaskan perbedaan-perbedaan budaya sebagai suatu seragam ataupun simbol-simbol yang fiktif.

Eliminasi berpikir Perennialistik

Dalam studi filsafat budaya, perennialis memandang suatu budaya memiliki sifat yang abadi, ideal, dan suatu pewarisan. Aliran ini berorientasi ke masa lalu, baik aspek nilai, norma ataupun budaya. Aliran perennialisme menganggap pengetahuan lebih penting, dan kurang memperhatikan gejala persoalan dan aktivitas sehari-hari. Sedangkan dalam suatu sistem masyarakat multikultural menghendaki cara berpikir progresif sesuai dengan perkembangan sosial dan budayanya, sehingga pikiran individu merekonstruksi nalar diversitas masyarakatnya. Akibatnya, corak pikiran perennialisme tidak sesuai dengan keadaan masyarakat multikultural sehingga memungkinkan untuk dieliminasi.

Elaborasi multikulturalisme progresif

Sebagai realitas sosial masyarakat hari ini filsafat multikulturalisme memiliki pijakan kuat dalam sistem masyarakat Indonesia. Suatu sistem adalah gagasan atau prinsip-prinsip yang saling bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Berhubungan dengan hal itu filsafat dipelajari secara sistematis, mengadakan tinjauan dengan memperoleh pandangan mengenai problematika dalam masyarakat. Dengan kata lain, problem masyarakat multikultural adalah filsafat itu sendiri.

Filsafat yang timbul yang mempelajari problema-problema itu, kesemuanya dapat merupakan lingkup dari masing-masing aliran yang ada. Maka dari itu aliran-aliran yang dibicarakan mempunyai kesamaan tinjauan sistematika horizontal. Keadaan masyarakat multikultural dalam kaca mata filsafat klasik bermuara pada filsafat naturalisme. Naturalisme, melihat aspek masyarakat berdasarkan karakter di permukaannya, dengan kaca mata ini maka filsafat progresivisme adalah implikasinya yang bertautan secara simultan dengan multikulturalisme. Jadi filsafat direvitalisasi dalam kerangka berpikir progresif dan berbasis multikulturalisme, yang mana dalam suatu budaya tidak ada klaim ras atau budaya yang superior dan inferior, serta paling penting adalah menegaskan konsep primordialisme prematur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka revitalisasi peran filsafat sebagai proses transformasi masyarakat multikultural adalah memosisikan sistem sosial masyarakat yang multikultural sebagai objek sekaligus subjek filsafat. Karena itu sentral pemikiran filsafat berpijak pada tiga pilar El, yaitu eligibilitas filsafat sosial secara praktis, eliminasi pemikiran bercorak perenialisme, dan elaborasi filsafat multikultural yang secara genealogis berasal dari filsafat progresivisme.

1. Masyarakat Multikultural

Istilah masyarakat majemuk telah diperkenalkan oleh diperkenalkan oleh J.S. Furnivall, seorang ilmuwan sosial dari Belanda ketika menjelaskan tentang masyarakat Indonesia (Bahri 2018:71). Masyarakat majemuk, ataupun masyarakat multikultural pada masa Hindia Belanda menurut Furnivall dipahami sebagai suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen

yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Nasikun 1993:29). Dalam pandangan Furnivall, masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) tersusun dalam sebuah relasi sosial adanya kelompok penguasa dan yang dikuasai berdasarkan perbedaan ras. Furnivall yang mengartikan pluralitas masyarakat Indonesia di dalam konteks masyarakat kolonial dengan membedakan golongan-golongan Eropa, Tionghoa dan Pribumi (Bahri 2018)

Kemajemukan masyarakat sebagaimana pendapat Furnivall tersebut kemudian diinterpretasikan dalam kultur masyarakat era kolonial. Sementara kondisi masyarakat hari ini sudah sangat berbeda. Setelah Kemerdekaan pembagian kelompok masyarakat di atas melebur. Makna kemajemukan masyarakat pada saat ini tidak didasarkan atas hegemoni satu kelompok dengan kelompok lainnya, namun pluralitas didasarkan pada perbedaan internal di antara sesama warga negara (Bahri 2018). Karena itu masyarakat multikultural Indonesia saat ini mesti dilihat dari pluralitas masyarakatnya berdasarkan kebudayaan, kekerabatan, suku bangsa, etnik, ras, dan agama. Kompleksitas multikultural masyarakat Indonesia bukan atas pembagian wilayah geografis, dan simbol intrinsik kebudayaan, melainkan nilai yang dikandung dalam setiap kebudayaan tersebut. Menurut Nasikun (1993), struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik, yaitu: (1) Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Dan (2) secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Kelemahan mendasar yang terdapat masyarakat majemuk adalah rentan terjadi konflik (Liata and Fazal 2021). Kegagalan dalam mengelola perbedaan dan kemajemukan akan bisa menyebabkan beragam ketegangan, permusuhan, konflik yang tidak jelas ujung pangkalnya (Saidurrahman and Arifinsyah 2018). Bahkan sangat mungkin sampai pada titik segregasi dan disintegrasi. Pada titik ini kemajemukan justru menjadi tempat di mana permasalahan muncul,

bukan penyelesaian masalah (Molan 2015:108). Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada masyarakat majemuk tersebut, maka dikembangkan konsep masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural, keragaman dan perbedaan tidak dilihat sebagai alat atau alasan untuk munculnya diskriminasi, dominasi dan hegemoni, namun justru menjadi media untuk memahami dan mengapresiasi perbedaan tersebut (Bahri 2018).

Multikulturalisme adalah ideologi yang menghargai perbedaan dan kesederajatan. Perbedaan individual maupun perbedaan kelompok dilihat sebagai perbedaan kebudayaan. Bahkan, multikulturalisme juga memperjuangkan kelas-kelas sosial yang tertindas. Disinilah peran filsafat menjadi penting, membangun hidup bersama yang harmonis dengan menegasikan sikap primordialisme, dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh individu yang berpikir terbuka, kritis, progresif, dan memaknai hakikat hidup itu sendiri. Oleh karena itu, multikulturalisme dibahas dalam ruang lingkup ilmiah dan dengan pendekatan teoretis dan praktis. Artinya, jika pandangan multikulturalisme dapat membawa sebuah komunitas manusia kepada kesejahteraan (misalnya rasa aman, rasa kasih sayang, kepedulian dan keadilan), maka ia harus menduduki peranan penting untuk dilakukan pengkajian secara filosofis dan akademis. Filsafat perlu diposisikan peran dan fungsinya bagi pengembangan hidup manusia secara utuh, sehingga dapat memberikan pencerahan bagi dinamika kehidupan manusia.

2. Revitalisasi Peran Filsafat

Filsafat membantu manusia memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap diri sendiri, masyarakat, dan alam semesta. Filsafat juga membantu manusia dalam memahami dan membedakan konsep-konsep yang kompleks dan abstrak. Melalui filsafat, individu dapat mengklarifikasi dan memperluas pemahamannya tentang konsep-konsep seperti keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Dengan demikian, filsafat dapat membantu manusia dalam mengambil keputusan etis yang lebih baik dan bertindak dengan penuh kesadaran terhadap implikasi moral dari tindakan mereka (Alim 2020; Widyastini 2007).

Revitalisasi filsafat merupakan konsekuensi logis hakikat filsafat itu sendiri, sebagai satu bentuk dialektika mencintai kebijaksanaan. Jika orang agamis menganggap kebenaran hanya berasal dalam agama tertentu, secara filosofis kebenaran itu multitafsir dan sifatnya transendental sehingga filsafat dapat mencapai kebenaran yang dimaksud. Keabsahan filsafat sosial adalah persyaratan akademis sehingga dapat menguatkan kajian ilmiah sehingga menuai pembaharuan untuk mengatasi berbagai problematika kemasyarakatan.

Konteks filsafat perlu direvitalisasi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan keadaan masyarakat itu sendiri. Konsep eligilitas filsafat sosial harus dikaji dalam ruang terbuka, dan tidak dikhawatirkan menuai kritikan karena kritis itu sendiri adalah bagian dari proses berpikir filsafat. Seperti halnya para ilmuwan, tugas para filsuf adalah mendekatkan hidup manusia pada yang ideal. Yang ideal bukan kenyataan yang terpisah dari hidup manusia melainkan ada di dalam diri manusia yang perlu dipahami lebih mendalam dalam relasi dengan alam sekitar. Dalam hal ini Dewey memperkenalkan istilah ideal dalam kenyataan. Baginya, Yang ideal itu bukanlah sebetuk ilusi melainkan kenyataan yang sudah hadir dalam pengalaman hidup manusia. Untuk itu, Dewey menekankan adanya aktivitas filsafat yang menghubungkan antara yang ideal dan kenyataan aktual (Dewey 1984).

Para filsuf telah memikirkan relasi filsafat dan keadaan sosial dengan menegaskan kesatuan antara yang ideal dengan pengalaman hidup manusia. Dalam hal ini perlu didamaikan pertentangan empirisme dan idealisme. Dewey menjelaskan kesatuan nilai-nilai yang dianggap ideal dipertaruhkan dalam pengalaman hidup masyarakat dan secara tegas ditampakkan dalam proses berpikir filsafat itu sendiri, yakni sebagai suatu proses pemaknaan pengalaman dan pengembangan taraf hidup (Dewey 1948). Jika selama ini filsafat dibahas dalam kerumitan ruang akademik, yang sering dipertentangkan dari segi pemaknaan filsafat para filsuf, maka pemikiran ini perlu dieliminasi agar filsafat membumi dalam sistem sosial masyarakat multikultural. Pengalaman telah membuktikan keragaman masyarakat menuai konflik berkepanjangan,

maka pengalaman itu memberikan pelajaran penting bahwasanya hidup akan senantiasa berkembang dinamis dalam ruang yang sangat luas sehingga tidak ditutupi dapat oleh pemikiran idealitas dan perenialistik.

Pengalaman manusia memiliki dimensi yang plural sehingga aspek filsafat tidak dapat dibahas dari aspek intrinsik suatu nilai-nilai lama. Metafisika alamiah yang selama ini menghadirkan nilai-nilai ideal dan perenialistik, diadaptasikan dengan konteks kebaruan berdasarkan aspek fisik empiris. Filsafat sosial direvitalisasi sesuai dengan pengalaman manusia yang dinamis, kontinuitas dan senantiasa bertransformasi. Transformasi pengalaman sangat penting agar setiap pribadi terbantu untuk mengembangkan potensi dirinya secara lebih optimal dan mampu mengolah segala pengalaman yang menghambat perkembangan hidup. Rekonstruksi filsafat atau juga disebut sebagai rekonstruksi pengalaman perlu dilakukan terus-menerus agar filsafat mampu memberi pencerahan kepada manusia untuk mengolah pengalaman hidupnya dan mengembangkan diri secara lebih utuh dan kreatif (Rockefeller 1991:519). Filsafat perenial akan selalu berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat multikultural. Dikarenakan karakteristik cara berpikir yang dibangun sifatnya “akulah yang ada dan ideal” bukan karena “aku ada karena kita”, yakni kita yang menciptakan “diri kita bersama” sehingga hidup bersama jauh lebih manusiawi daripada mempertahankan status quo yang sifatnya primordialistik. Sebaliknya rekonstruksi filsafat empirisme menduduki peran strategis dalam merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan demi kelangsungan hidup bersama dalam komunitas masyarakat multikultural.

3. Filsafat Multikulturalisme-Progresif

Dalam konteks manusia sekarang, harus disadari bahwa setiap aplikasi suatu bagan teoritis tidaklah dapat diterapkan secara gegabah, tanpa memperhatikan kondisi yang ada. Diantaranya yang terpenting adalah realitas politik yang belum mengizinkan pengebangan suatu *kesadaran kritis*. Kesadaran ini, jika ditarik hikmahnya, maka menunjukkan adanya suatu realitas budaya yang “terbenam dalam kebudayaan bisu (Freire 1984). Kebudayaan bisu diterima secara *taken for granted*, dengan sikap masa bodoh saja. Kalaupun ada

satu atau dua nalar dengan suara kritis, ia akan dibungkam secara *nature* dan bahkan digiring keluar arena kompetisi.

Revitalisasi filsafat sebagai isu transformasi sosial bukan sekedar angan-angan *utopis*, bagaimana mungkin dalam iklim hidup seperti ini bisa tumbuh dan berkembang para sarjana, yang tidak hanya *committed* pada cita-cita, melainkan juga mengabdikan kepada pengetahuan (*devotee of knowledge*). Filsafat dalam masyarakat diharapkan tidak hanya mampu menyajikan teori yang melambung ke langit, melainkan memiliki akar yang realistis di permukaan bumi yang datar ini. Sedangkan transformasi masyarakat multikultural dimaksudkan bukan sebagai perubahan sistem manajemen hidup yang tanpa perencanaan dan aktivitas keilmuan yang radikal, sistematis, logis dan universal, melainkan memerlukan sebuah proses refleksi pemikiran dan aksi yang berdimensi kontinuitas. Dan target substansial yang ingin diraih adalah terwujudnya masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, bukan sebuah idealisme semu tanpa makna.

Dalam studi multikulturalisme, suatu budaya mengandung kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran ini tidak dapat dibawa dan disamakan dengan kebudayaan lain yang ada di dunia. Dalam kajian ilmiah, masyarakat multikultural adalah transformasi dari sosial budaya yang ada. Yang berevolusi dan berubah secara bertahap sehingga membentuk satu ciri khas kebudayaan. Hal ini dijelaskan oleh Kistanto (2018), bahwasanya Transformasi sosial-budaya sebagai dinamika budaya dalam peradaban masyarakat manusia meliputi proses yang lama dan bertahap-tahap, tidak selalu *linear* dan tidak selalu berjalan lurus dan lempang dari tahap ke tahap. Tahapan-tahapan dari transformasi ini kemudian menghasilkan tipologi masyarakat dengan wujud dan karakteristik kehidupannya. Transformasi sosial budaya, dengan demikian, terjadi dari satu tahap ke tahapan yang lain, di satu waktu atau di waktu lain, di satu tempat atau di tempat lain, berlangsung tidak sama.

Latar budaya sebagai realitas dengan nilai-nilai masyarakat kepulauan yang sangat heterogen, plural, multietnik, multilingual, multirasial - sehingga

disebut multikultural - berpaduan dengan realitas geografis (berkarakteristik alam daratan dan lautan), geopolitik (kawasan strategis dalam pergaulan antar bangsa dengan kepentingan-kepentingan politik dan ideologi), dan geoekonomi (berkarakteristik ekonomi, manajemen, dan mata pencaharian agraris tradisional-feodal). Latar budaya yang kompleks, rumit dan khas ini dapat menguntungkan jika upaya-upaya pengelolaannya tidak terganggu oleh sikap dan tingkah-laku warga masyarakat yang kontra-produktif dan mementingkan diri sendiri dan kelompok-kelompoknya (Kistanto 2018).

Jika ditarik garis tahapan-tahapan eksistensi masyarakat Indonesia, maka transformasi-transformasi masyarakat telah mencapai pada tahapan akhir. Para sosiologi memetakan tipologi masyarakat, baik desa dan kota, agraris-maritim, homogen-heterogen, pra industri-pasca industri, ataupun masyarakat digital. Istilah-istilah yang disematkan kepada masyarakat telah cukup banyak, sehingga konsekuensinya adalah pelbagai kajian masyarakat dapat dilakukan. Namun garis-garis tahapan itu mencapai akhir, setidaknya pada saat ini masyarakat pasca industrial dikenal dengan berbagai macam corak kebudayaan, sehingga kajian multikulturalisme adalah bagian dari berpikir filsafat.

Karakteristik multikultural masyarakat meniscayakan adanya pemahaman berpikir filsafat yang multikultural, atau filsafat multikulturalisme. Multikulturalisme adalah suatu konsep yang mengedepankan kebersamaan, penerimaan, pengakuan, dan keadilan bagi sesama. Sebagai kajian filsafat, konsep multikulturalisme menarik ditilik filsafat multikulturalisme perspektif John Rawls dalam buku *theory of justice* (2001). Rawls mengafirmasi perlunya keadilan dan kesederajatan dikedepankan dalam kehidupan ini. Misalnya membiasanya sebutan kita kepada orang lain, bukan kami dan kamu. Dalam pengamatan penulis, untuk konteks global saat ini pemikiran filsafat multikulturalismenya perlu diangkat guna menemukan alternatif jawaban dari berbagai persoalan kemanusiaan (Rehayati 2012).

Rehayati (2012) menyebutkan kultur komunitas memiliki paradigma berpikir, nilai dan filosofi hidup yang berbeda satu sama lain. Keberbedaan ini

muncul dalam memaknai hidup individu dengan lingkungannya, sehingga memunculkan keberagaman. Dalam konteks ini diperlukan kebijakan-kebijakan yang simpatik dari penguasa untuk melegalsir suatu keputusan yang berdasarkan konsep keadilan, yang disebut Rawls dengan istilah *justice as fairness* (2001). Menurut Rawls, entitas masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin “*the greatest happiness for the greatest number*,” sebagaimana yang dikenal selama ini dengan prinsip demokrasi. Tetapi masyarakat yang adil adalah adanya pengakuan dan penerimaan terhadap diversitas masyarakat (Rawls 2001). Rehayati menulis, pendapat ini dituangkan oleh Rawls dalam pokok-pokok pemikirannya tentang keadilan, seperti *justice of fairness, veil of ignorance, principle of equal liberty, maximin rule, lexical, lexical order dan reflective equilibrium* (Rehayati, 2012).

Berdasarkan pandangan di atas, filsafat multikulturalisme meniscayakan akan adanya pengakuan individu terhadap individu dan lingkungannya. Setelah memberi pengakuan, maka diberikan penghargaan, kesederajatan, dan persamaan dimata hukum ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai lima pilar kebangsaan memegang peranan penting untuk menyukseskan multikulturalisme. Konsep bhinneka tunggal ika, tidak lain adalah manifestasi dari multikulturalisme, namun dalam aktivitas sehari-hari bukan hanya teoritis saja yang perlu digaungkan, melainkan praktis di lapangan dalam segala kebijakan pemerintah, yang mengandung keadilan bagi semua.

Bikhu Parekh (2001), menjelaskan suatu masyarakat multikultural memiliki sistem makna, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, tradisi, dan kebiasaan. Dalam kultur yang demikian, masyarakat harus memaknai dirinya dari perspektif ia tinggal, sehingga nilai-nilai ataupun norma orang lain dapat ditaati olehnya dan memunculkan rasa persamaan dan keadilan. Dalam Teori Keadilan, Rawls mengkritik pemikiran utilitarianisme dan intuisiisme, yang sekarang ini sering dipergunakan sebagai landasan filosofis dan konsep keadilan. Menurutnya, utilitarianisme tidak dapat mewujudkan keadilan sosial

dalam masyarakat, karena mengukur kesejahteraan individu pada kesejahteraan masyarakat. Konsep keadilan seperti telah mereduksi kesejahteraan masyarakat karena memaksakan suatu pengorbanan individu untuk keuntungan orang banyak. Adapun pemikiran model intuisiisme menurutnya tidak memiliki alasan rasionalitas, karena mengandalkan intuisi (Rawls 2001). Sehingga menurut Rehayati yang secara khusus mengkaji filsafat multikulturalisme Rawls, filsafat multikulturalisme sangat relevan dengan negara Indonesia yang komposisi masyarakatnya multikultural (Rehayati 2012:213)

Studi multikulturalisme memiliki pijakan kuat pada suatu komunitas masyarakat multikultural. Telah banyak para pakar multikulturalis menyumbangkan idenya, demi keberlangsungan hidup harmonis. Namun yang perlu ditekankan bahwa masyarakat multikultural Barat, dengan Timur, dan Indonesia khususnya, tentu memiliki perbedaan yang tajam. Barat, yang selama ini dikenal menganut prinsip sekularisme memang memiliki kajian filsafat multikulturalisme yang mendalam. Dengan kata lain pijakan filsafat multikulturalisme bukan berdasarkan nilai moral suatu agama tertentu melainkan nilai-nilai budaya yang ada pada setiap agama. Lain halnya negara kita, nilai moral dan nilai religius tampak cukup kentara di permukaan sehingga tidak bisa dikesampingkan akan mempengaruhi filsafat multikulturalisme itu sendiri.

Sebagai contoh, sebagai falsafah negara, Pancasila lahir tidak lepas dari peran tokoh agama tertentu, begitu juga dengan konsep bhinneka tunggal ika. Berdasarkan perspektif ini, filsafat multikulturalisme tidak bisa berdiri pincang sendiri melainkan harus ditopang oleh kajian falsafah negara yang sudah diakui memiliki karakter multikulturalisme. Sebagaimana dikatakan oleh Clifford, Sebagai masyarakat yang berbudaya, cara yang dipakai oleh semua anggota dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami siapa diri mereka dan kemudian memberi arti pada kehidupan mereka (Geertz 1992:2-3). Penulis menawarkan satu konsep penting, agar akar-akar filsafat progresivisme berbaur

bersama multikulturalisme, dikarenakan corak berpikir progresif menghendaki keadaan masyarakat multikultural itu sendiri yang berbeda dengan daerah lain.

Dalam kacamata progresif, sebagaimana tokoh-tokoh seperti John Dewey, memosisikan filsafat progresif sebagai acuan dalam melihat realitas, bukan hanya idealitas. Sehingga pengalaman atau empirisme menjadi batu loncatan untuk berpikir lebih mendalam tentang hakikat hidup di masyarakat multikultural. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri.

Filsafat multikulturalisme-progresif adalah kajian mendalam pada aspek sosial yang dinamis, yang mana menghendaki adanya kepedulian dan kebersamaan antar sesama manusia dalam skala kehidupan yang luas dan sifatnya kontinuitas sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri. Poin penting dalam studi adalah bagaimana pemikiran yang dimunculkan memiliki aspek keadilan bagi semua kalangan, bahkan minoritas sekalipun. Filsafat ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir benih-benih konflik yang terjadi pada individu di tengah pluralitas masyarakat dengan cara yang progresif atau kontekstual.

D. Penutup

Filsafat menduduki peran penting dalam proses transformasi masyarakat multikultural. Indonesia sebagai negara yang plural menghendaki kajian filsafat mendalam berdasarkan objek dan subjek filsafatnya keadaan sosial masyarakat itu sendiri. Sebagai upaya revitalisasi peran filsafat di sini, maka ada tiga poin penting yang perlu dilakukan, yaitu dengan tiga pilar El, eligibilitas filsafat sosial, eliminasi berpikir perenialistik, dan elaborasi filsafat multikulturalisme progresif. Masyarakat multikultural di Indonesia saat ini telah bertransformasi dari berbagai tahapan-tahapan yang dalam istilah sosiologi dikenal dengan transformasi sosial budaya. Nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat juga akan selalu bertransformasi seiring dengan perkembangan dunia, dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga tak tertutup kemungkinan perubahan-perubahan akan selalu terjadi. Seiring demikian maka filsafat yang muncul pun harus sesuai dengan keadaan masyarakat, bahkan mampu memprediksikan masyarakat multikultural akan datang. Hal ini meniscayakan filsafat multikulturalisme-progresif dibahas dalam ruang ilmiah, secara serius dan sistematis sehingga peran filsafat dapat dirasakan bukan hanya pada level akademik, melainkan juga level masyarakat khususnya.

Daftar Pustaka

- Alim, Alimatus sa'diyah. 2020. "Hakikat Manusia, Alam Semesta, Dan Masyarakat Dalam Konteks Pendidikan Islam." *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* 15(2):144-60. doi: 10.20414/jpk.v15i2.1760.
- Atabik, Ahmad. 2014. "TEORI KEBENARAN PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 2(2). doi: 10.21043/FIKRAH.V2I2.565.
- Bahri, Syamsul. 2018. "Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikulturalisme Di Indonesia (Landasan Filosofis Dan Psikologis Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikulturalisme)." *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 19(1):69-88.
- Dewey, John. 1984. *Democracy and Education*. New York: Mcmillan Co.
- Freire, Paulo. 1984. *Cultural Freedom for Action*. Harmonsworth: Penguin Books.
- Geertz, Clifford. 1992. *The Interpretation of Culture*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kistanto, Nurdien Harry. 2018. "TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 13(2):169. doi: 10.14710/sabda.13.2.169-178.
- Liata, Nofal, and Khairil Fazal. 2021. "MULTIKULTURAL PERSPEKTIF SOSIOLOGIS." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1(2):188. doi: 10.22373/arj.v1i2.11213.
- M Yunus, Firdaus. 2010. "Filsafat Sosial; Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12(1):149-66. doi: 10.22373/SUBSTANTIA.V12I1.3784.
- Molan, Benyamin. 2015. *Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama Yang Stabil Dan Dinamis*. Jakarta: Indeks.

- Morris, Debra, and Ian Shapiro. 1993. *John Dewey Responds: The Political Writings*. indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parekh, B. 2001. "Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory." *Ethnicities* 1(1):109–15. doi: 10.1177/146879680100100112.
- Pradana, Shandy. 2020. "7 Filsafat Yang Berikan Perspektif Berbeda Tentang Makna Kehidupan." *IDN TIMES*. Retrieved May 21, 2022 (<https://www.idntimes.com/life/inspiration/shandy-pradana/7-filsafat-yang-berikan-perspektif-berbeda-tentang-makna-kehidupan-c1c2-1/7>).
- Prasetyo. Yohanes Wahyu. 2020. "Peran Filsafat Dalam Membangun Perdamaian, Kemanusiaan Universal, Dan Nalar Masyarakat Indonesia." *JPIC-OFM Indonesia*. Retrieved January 21, 2023 (<https://jpicofmindonesia.org/2020/07/peran-filsafat-dalam-membangun-perdamaian-kemanusiaan-universal-dan-nalar-masyarakat-indonesia/>).
- Rahman, Taufiq. 2018. *Pengantar Filsafat Sosial*. Bandung: LEKKAS.
- Rawls, John. 2001. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press.
- Rehayati, Rina. 2012. "Filsafat Multikulturalisme John Rawls." *Jurnal Ushuluddin* 18(2):208–22. doi: 10.24014/JUSH.V18I2.710.
- Rockefeller, Steven C. 1991. *John Dewey: Religious Faith and Democratic Humanism*. New York: Columbia University Press.
- Saidurrahman, and Arifinsyah. 2018. *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Wattimena, Reza A. .. 2020. "Makna Kehidupan." *Rumah Filsafat*. Retrieved January 21, 2023 (<https://rumahfilsafat.com/2020/05/11/makna-kehidupan/>).
- Webster, R. Scott. 2017. "Education or Quality of Teaching? Implications for Australian Democracy." *Australian Journal of Teacher Education* 42(9):59–73. doi: 10.14221/ajte.2017v42n9.4.
- Widyastini. 2007. "Nilai-Nilai Moral Yang Terkandung Dalam Tasawuf Al-Ghazali Dan Pengaruhnya Terhadap Etika Islam." *Jurnal Filsafat* 10(2):208–17. doi: 10.22146/JF.31346.